

Nama : Mar'atus Shalihah
NPM : 2313031025
Kelas : A
Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan
Tugas : UAS (Ujian Akhir Semester)

SOAL UAS EKONOMI PENDIDIKAN

Soal 1 – Efisiensi Anggaran Pendidikan

Kasus

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

Pertanyaan

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.
2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia.

Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan

Kasus

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

Pertanyaan

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.
2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan.

Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Soal 3 – Pengangguran Terdidik

Kasus

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.
2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut.

Berikan rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan

Kasus

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

Pertanyaan

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.
2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.
3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran

Kasus

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

Pertanyaan

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost.
2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan.

Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

JAWABAN UAS EKONOMI PENDIDIKAN

Soal 1 – Efisiensi Anggaran Pendidikan

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.

Penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten A cenderung berfokus pada belanja infrastruktur fisik berupa pembangunan gedung sekolah baru, sementara komponen yang secara langsung berpengaruh pada proses pembelajaran seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan media digital justru mendapat porsi yang sangat kecil. Kondisi ini menunjukkan permasalahan pada efisiensi internal pendidikan, yaitu bagaimana input berupa anggaran dikonversi menjadi output yang berkualitas.

Secara internal, anggaran memang berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah karena ketersediaan gedung baru memperluas daya tampung. Namun karena kualitas pengajaran tidak ikut meningkat, hasil belajar siswa pun stagnan. Ini berarti sumber daya yang tersedia tidak digunakan secara efisien untuk menghasilkan *outcome* pendidikan yang sesungguhnya.

Dari sisi efisiensi eksternal, kondisi ini juga bermasalah. Efisiensi eksternal pendidikan mengukur sejauh mana output pendidikan (lulusan) mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat secara lebih luas. Ketika kualitas pembelajaran tidak meningkat, lulusan yang dihasilkan kemungkinan besar tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk berkontribusi secara produktif dalam perekonomian daerah. Artinya, investasi besar pada fisik tidak menghasilkan manfaat eksternal yang sebanding.

2. Dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia.

Kebijakan yang terlalu berat ke pembangunan fisik berdampak langsung pada rendahnya kualitas SDM yang terbentuk. Guru yang tidak mendapat pelatihan memadai sulit menyampaikan materi secara efektif dan tidak mampu mengikuti perkembangan metode pengajaran terkini. Siswa pun akhirnya belajar dengan kualitas interaksi edukatif yang rendah, meskipun mereka belajar di gedung yang baru dan layak.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghasilkan angkatan kerja dengan kompetensi yang kurang kompetitif. Investasi besar dalam pendidikan tidak menghasilkan peningkatan *human capital* yang setara, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah pun bisa terhambat karena tidak ditopang oleh tenaga kerja yang produktif dan terampil.

3. Rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Pemerintah daerah perlu melakukan reorientasi belanja pendidikan dengan menggeser sebagian anggaran dari pembangunan fisik ke program peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan. Selain itu, pengadaan media pembelajaran digital beserta pelatihan penggunaannya perlu dijadikan prioritas agar transformasi kualitas pembelajaran bisa benar-benar terjadi di dalam kelas. Yang tidak kalah penting adalah mengubah indikator keberhasilan anggaran dari sekadar jumlah gedung terbangun menjadi capaian hasil belajar siswa, sehingga evaluasi kebijakan menjadi lebih berorientasi pada mutu.

Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan

1. Bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.

Ketimpangan yang terjadi dalam kasus ini bersifat struktural dan mencakup beberapa lapisan sekaligus. Pertama adalah ketimpangan pada sisi input, di mana sekolah perkotaan jauh lebih unggul dalam hal fasilitas, teknologi, dan kualitas guru dibandingkan sekolah pedesaan. Perbedaan ini berkait erat dengan persoalan equity (pemerataan pendidikan), karena akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas tidak terdistribusi secara adil. Kondisi ini kemudian berlanjut pada ketimpangan proses, karena kualitas pengajaran yang diterima siswa desa tidak sebanding dengan yang diperoleh siswa kota. Muaranya adalah ketimpangan output yang tampak jelas dari perbedaan hasil ujian antara kedua kelompok tersebut.

2. Dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan.

Siswa dari daerah pedesaan yang tidak mendapat akses pendidikan berkualitas akan memasuki pasar kerja dengan modal manusia yang lebih terbatas. Akibatnya mereka cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih rendah dan memiliki mobilitas sosial yang sempit. Kondisi ini berisiko mereproduksi kemiskinan lintas generasi, karena anak-anak dari keluarga miskin akan sulit keluar dari lingkaran tersebut tanpa pendidikan yang memadai.

Secara makro, ketimpangan ini akan memperbesar kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah pedesaan kehilangan potensi tenaga terampil lokal yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi setempat, sehingga pembangunan semakin terkonsentrasi di kota dan ketimpangan antardaerah semakin dalam.

3. Solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Kebijakan yang perlu ditempuh di antaranya adalah memberikan insentif yang lebih menarik bagi guru untuk mengabdikan diri di daerah terpencil, misalnya melalui tunjangan khusus dan percepatan karier. Di sisi fasilitas, perlu ada program afirmasi pengadaan teknologi dan infrastruktur internet di sekolah pedesaan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus yang diformulasikan ulang berdasarkan tingkat ketertinggalan daerah. Kemitraan antara sekolah kota dan desa melalui platform digital untuk berbagi modul dan sumber belajar juga bisa menjadi langkah konkret yang relatif mudah diterapkan.

Soal 3 – Pengangguran Terdidik

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori *human capital*.

Menurut teori *human capital*, pendidikan seharusnya meningkatkan produktivitas individu sehingga kemudian diserap oleh pasar kerja. Namun di Kota B, meskipun jumlah lulusan terus bertambah, banyak yang tidak terserap atau bekerja di luar bidangnya. Ini mengindikasikan bahwa *human capital* yang dihasilkan perguruan tinggi tidak sesuai dengan jenis *human capital* yang sesungguhnya dibutuhkan industri. Fenomena ini sering disebut sebagai *skill gap*, yaitu kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan dan kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja.

Penyebab utamanya adalah kurikulum yang terlalu teoritis dan tidak mengikuti perkembangan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, fenomena *mismatch* bidang studi juga berkontribusi, di mana banyak mahasiswa memilih jurusan berdasarkan *prestise* bukan prospek serapan kerja. Ketika pasar dibanjiri lulusan dengan gelar serupa namun kompetensi aktual yang beragam, nilai sinyal dari ijazah pun menurun dan perusahaan semakin selektif dalam merekrut.

2. Hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut.

Kasus ini menggambarkan terputusnya koneksi antara dunia pendidikan tinggi dan dunia industri. Perguruan tinggi sebagai pihak yang memproduksi lulusan tidak memiliki mekanisme yang cukup efektif untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Sementara industri sebagai pengguna tenaga kerja merasa kompetensi lulusan belum siap pakai sehingga biaya rekrutmen dan pelatihan ulang di perusahaan menjadi tinggi. Hasilnya adalah penumpukan pengangguran terdidik yang sebenarnya bisa dicegah jika komunikasi antara kedua pihak berjalan lebih baik.

3. Rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

Perguruan tinggi perlu melibatkan perwakilan industri secara aktif dalam proses penyusunan dan evaluasi kurikulum, bukan hanya sebagai formalitas. Program magang yang terintegrasi dalam sistem kredit perlu diperkuat agar mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja nyata sebelum lulus. Selain itu, pemerintah perlu mendorong transparansi data serapan lulusan per program studi agar calon mahasiswa bisa membuat pilihan jurusan yang lebih realistis berdasarkan peluang kerja yang tersedia.

Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan

1. Analisis berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.

Dari sisi ekonomi, pendidikan tinggi memiliki karakteristik yang berada di antara barang publik dan barang privat. Sebagai barang privat, pendidikan bersifat *excludable* karena mereka yang tidak membayar tidak bisa mengikuti perkuliahan, dan rival karena kapasitas kelas terbatas. Dari sudut pandang ini, keputusan universitas swasta untuk menaikkan UKT sesuai kebutuhan operasional sebenarnya logis secara ekonomi.

Namun pendidikan juga menghasilkan eksternalitas positif yang luas bagi masyarakat, seperti peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi, sehingga ia kerap disebut sebagai *quasi-public good*, yaitu barang yang secara teknis privat tetapi manfaatnya turut dirasakan oleh masyarakat secara luas. Karena manfaatnya tidak hanya dinikmati individu, menyerahkan harga pendidikan sepenuhnya pada mekanisme pasar akan menghasilkan tingkat partisipasi yang lebih rendah dari yang optimal secara sosial. Kenaikan 25 persen UKT ini memperjelas ketegangan antara logika bisnis universitas swasta dan fungsi sosial pendidikan tinggi itu sendiri.

2. Dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.

Kenaikan UKT yang cukup signifikan berpotensi memutus akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Mereka yang tidak memiliki simpanan atau akses kredit terpaksa menghentikan studi, sementara calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu mungkin mengurungkan niatnya untuk masuk perguruan tinggi sama sekali. Dalam jangka menengah, hal ini memperparah ketimpangan sosial karena akses ke tangga mobilitas sosial yang paling efektif pun menjadi semakin tidak merata.

3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Pemerintah perlu dan layak untuk melakukan intervensi dalam kasus ini, meskipun institusinya merupakan universitas swasta. Alasannya ada dua hal pokok. Pertama, karena pendidikan menghasilkan eksternalitas positif bagi masyarakat luas, pasar yang dibiarkan berjalan sendiri tidak akan menghasilkan tingkat investasi pendidikan yang optimal, sehingga subsidi pemerintah menjadi bentuk koreksi yang sah atas kegagalan pasar tersebut. Kedua, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan warganya tidak terhalang mengakses pendidikan hanya karena kendala ekonomi. Bentuk intervensinya tidak harus berupa penetapan harga secara langsung, karena itu bisa mengurangi insentif universitas untuk meningkatkan kualitas. Pemerintah bisa memperluas cakupan program KIP Kuliah berbasis kebutuhan, atau mengembangkan skema pinjaman pendidikan berbunga rendah yang pengembaliannya disesuaikan dengan pendapatan setelah bekerja.

Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran

1. Analisis menggunakan konsep biaya pendidikan dan *opportunity cost*.

Digitalisasi pembelajaran secara tidak langsung menambahkan komponen biaya baru dalam pendidikan yang sebelumnya tidak diperhitungkan, yaitu biaya pengadaan perangkat seperti laptop atau *smartphone* dan biaya langganan kuota internet. Bagi keluarga yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, biaya-biaya ini bukan sekadar pengeluaran tambahan, melainkan sebuah pilihan yang menyakitkan.

Di sinilah konsep *opportunity cost* menjadi relevan. Ketika keluarga tidak mampu membeli perangkat digital, biaya sesungguhnya bukan hanya uang yang tidak dikeluarkan, melainkan hilangnya kesempatan belajar yang seharusnya bisa diperoleh anak. Dalam jangka panjang, anak yang tidak bisa berpartisipasi dalam pembelajaran digital akan memiliki literasi teknologi yang lebih rendah dan menghadapi tantangan lebih besar di pasar kerja yang semakin berbasis keterampilan digital. Itulah *opportunity cost* terbesar dari kesenjangan akses ini.

2. Dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan.

Kesenjangan digital menciptakan situasi yang oleh beberapa ahli disebut sebagai *dual-track learning*, di mana sebagian siswa belajar dengan pengalaman yang kaya melalui platform digital, sementara sebagian lainnya tertinggal dengan sumber belajar yang sangat terbatas. Kondisi ini mempersulit guru dalam menerapkan standar pengajaran yang merata karena tidak semua siswa bisa diakses melalui platform yang sama.

Selain itu, siswa yang tidak terlayani secara digital berisiko mengalami *learning loss*, yaitu hilangnya capaian belajar akibat tidak terpenuhinya proses pembelajaran secara konsisten. Jika kesenjangan ini tidak segera diatasi, digitalisasi pendidikan yang seharusnya menjadi alat pemerataan justru bisa menjadi faktor yang memperdalam ketimpangan. Siswa dari keluarga kurang mampu yang sudah tertinggal secara ekonomi akan semakin jauh secara akademik, dan ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia nasional secara keseluruhan.

3. Solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pemerintah perlu menjadikan subsidi perangkat belajar dan kuota internet sebagai bagian permanen dari program bantuan sosial pendidikan, bukan hanya respons darurat di masa pandemi seperti sebelumnya. Sasarannya adalah siswa dari keluarga penerima manfaat program PKH dan BPNT. Selain itu, pembangunan pusat belajar komunitas berbasis teknologi di tingkat desa bisa menjadi solusi bagi siswa yang tidak memiliki perangkat sendiri, terutama di daerah yang infrastruktur internetnya masih terbatas.

Dari sisi konten, pengembangan materi pembelajaran yang bisa diakses secara luring atau *offline* perlu diprioritaskan agar ketergantungan pada koneksi internet yang stabil bisa dikurangi. Kolaborasi dengan perusahaan telekomunikasi melalui skema CSR juga bisa didorong untuk mempercepat penyediaan infrastruktur digital di daerah terpencil dengan biaya yang lebih efisien bagi anggaran negara.